

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Untuk memajukan usaha atau bisnis dibutuhkan laporan keuangan yang baik. Tujuan akuntansi dan laporan keuangan pada dasarnya untuk menyediakan informasi keuangan suatu badan usaha yang akan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan suatu keputusan ekonomi. Untuk itu dibutuhkan suatu Standar Akuntansi Keuangan yang baik dan dapat dimengerti oleh berbagai pihak pengguna laporan keuangan. Praktik akuntansi di Indonesia dapat ditelusuri pada era penjajahan Belanda sekitar tahun 1642 (Soemarso 1995). Jejak yang jelas berkaitan dengan praktik akuntansi di Indonesia dapat ditemui pada tahun 1747, yaitu praktik pembukuan yang dilaksanakan Amphioen Sociteyt yang berkedudukan di Jakarta (Soemarso, 1995). Pada era ini Belanda mengenalkan sistem pembukuan berpasangan (*double-entry bookkeeping*) sebagaimana yang dikembangkan oleh Luca Pacioli. Perusahaan VOC milik Belanda merupakan organisasi komersial utama yang memainkan peranan penting dalam praktik bisnis di Indonesia selama era ini (Diga dan Yunus, 1997).

Kegiatan ekonomi pada masa penjajahan meningkat cepat selama tahun 1800-an dan awal tahun 1900-an. Hal ini ditandai dengan dihapuskannya tanam paksa, sehingga pengusaha Belanda banyak yang menanamkan modalnya di Indonesia. Pengiriman Van Schagen merupakan titik tolak berdirinya Jawatan Akuntan Negara.

Akuntan publik yang pertama adalah Frese & Hogeweg yang mendirikan kantor di Indonesia pada tahun 1918. Pendirian kantor ini diikuti kantor akuntan yang lain, yaitu kantor akuntan H.Y.Voerens pada tahun 1920 dan pendirian Jawatan Akuntan Pajak-*Belasting Accountant Dienst* (Soemarso, 1995). Orang Indonesia pertama yang bekerja di bidang akuntansi adalah JD Massie, yang diangkat sebagai pemegang buku pada Jawatan Akuntan Pajak pada tanggal 21 September 1929 (Soemarso, 1995).

Kesempatan bagi akuntan lokal (Indonesia) mulai muncul pada tahun 1942-1945, dengan mundurnya Belanda dari Indonesia. Pada tahun 1947 hanya ada satu orang akuntan yang berbangsa Indonesia, yaitu Prof. Dr. Abutari (Soemarso, 1995). Praktik akuntansi model Belanda masih digunakan selama era setelah kemerdekaan (1950-an). Pendidikan dan pelatihan akuntansi masih didominasi oleh sistem akuntansi model Belanda. Nasionalisasi atas perusahaan yang dimiliki Belanda dan pindahnya orang-orang Belanda dari Indonesia pada tahun 1958 menyebabkan kelangkaan akuntan dan tenaga ahli (Diga dan Yunus, 1997).

Pada pertengahan tahun 1980-an, sekelompok teknokrat muncul dan memiliki kepedulian terhadap reformasi ekonomi dan akuntansi yang berusaha untuk menciptakan ekonomi yang lebih kompetitif dan lebih berorientasi pada pasar dengan dukungan praktik akuntansi yang baik. Kebijakan kelompok tersebut memperoleh dukungan yang kuat dari investor asing dan lembaga-lembaga internasional (Rosser, 1999). Sebelum perbaikan pasar modal dan pengenalan

reformasi akuntansi tahun 1980-an dan awal 1990-an, dalam praktik banyak ditemui perusahaan yang memiliki tiga jenis pembukuan:

1. Menunjukkan gambaran sebenarnya dari perusahaan dan untuk dasar pengambilan keputusan.
2. Menunjukkan hasil yang positif dengan maksud agar dapat digunakan untuk mengajukan pinjaman/kredit dari bank domestik dan asing.
3. Menunjukkan hasil negatif (rugi) untuk tujuan pajak (Kwik 1994).

Pada awal tahun 1990-an, tekanan untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan muncul sehingga menjadikan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah profesi akuntansi di Indonesia selalu tanggap terhadap perkembangan yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dari dinamika kegiatan pengembangan standar akuntansi sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini. Setidaknya, terdapat tiga tonggak sejarah dalam pengembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu:

1. Pada tahun 1973, di mana menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia, merupakan pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku "Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)".
2. Pada tahun 1984, di mana pada saat itu komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 dan kemudian mengkodifikasikan dalam buku "Prinsip Akuntansi Indonesia

1984” dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia usaha.

3. Pada tahun 1994, di mana IAI kembali melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan melakukan kodifikasi dalam buku ”Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Oktober 1994.” Sejak tahun 1994, IAI juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya.

Era globalisasi sejalan dengan program harmonisasi Standar Akuntansi International yang diprakasai oleh *International Accounting Standards Committee* (IASC). Proses harmonisasi ini memiliki hambatan antara lain nasionalisme dan budaya, serta sistem pemerintahan pada tiap-tiap negara, perbedaan kepentingan antara perusahaan multinasional dengan perusahaan nasional yang sangat mempengaruhi proses harmonisasi antar negara, serta tingginya biaya untuk merubah prinsip akuntansi.

Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan dari harmonisasi ke adaptasi, kemudian menjadi adopsi dalam rangka konvergensi dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Pengadopsian Standar Akuntansi Internasional ke dalam Standar Akuntansi Domestik bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi, persyaratan akan item-item pengungkapan akan semakin tinggi, sehingga nilai perusahaan akan semakin tinggi pula, manajemen akan memiliki tingkat akuntabilitas tinggi dalam menjalankan perusahaan, laporan

keuangan perusahaan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan akurat, dan laporan keuangan akan lebih dapat diperbandingkan dan menghasilkan informasi yang valid untuk aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban perusahaan.

### **Pokok Bahasan**

Masalah–masalah penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya adalah “Bagaimana perkembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia?”

### **Tujuan dan Manfaat**

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui sejarah perkembangan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, sejak penjajahan Belanda sampai dengan sekarang ini.

Manfaat dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi pemikiran kepada para pemakai dalam memahami dan mengapresiasi praktek sekarang, masa depan dan struktur institusional bidang sains akuntansi.
2. Memahami sejarah perkembangan Standar Akuntansi Keuangan dari masa penjajahan sampai sekarang ini.
3. Memberikan kontribusi pemikiran kepada para pemakai agar dapat memahami Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dalam adaptasi Standar Akuntansi Internasional.

## PEMBAHASAN

### 1. Sejarah Perkembangan Akuntansi Di Indonesia

Sejarah akuntansi di Indonesia tentu tidak lepas dari perkembangan akuntansi di negara asal perkembangannya. Dengan kata lain, negara luarlah yang membawa akuntansi itu masuk ke Indonesia kendati pun tidak bisa disangkal bahwa di masyarakat Indonesia sendiri pasti memiliki sistem pencatatan pelaporan tersendiri. Untuk memberikan gambaran bagaimana perkembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, maka dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1  
Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Zaman Kolonial (1602-1799)	Zaman Penjajahan Belanda (1800-1942)	Zaman Penjajahan Jepang (1942-1945)	Zaman Kemerdekaan (1945-Sekarang)
Pencatatan Sederhana	Pencatatan debit dan kredit	Pencatatan debit dan kredit (tidak ada perubahan)	Harmonisasi ke standar akuntansi internasional (IFRS)

#### a. Zaman Kolonial

Pada zaman kolonial, transaksi dagang di Indonesia dilakukan secara barter sehingga tidak melakukan pencatatan. Kemudian pada tahun 1602 Belanda membentuk perserikatan dengan nama *Vereenidge Oost Indische Compagnie* (VOC). Pada akhir abad ke-18 VOC mengalami kemunduran dan akhirnya dibubarkan pada

tanggal 31 Desember 1799. Dalam kurun waktu itu, VOC memperoleh hak monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan secara paksa di Indonesia sehingga jumlah transaksi VOC terus meningkat, baik frekuensi maupun nilainya sehingga dapat dipastikan Maskapai Belanda telah melakukan pencatatan atas mutasi transaksi keuangan. Dalam hubungan itu, Ans Saribanon Sapii (1980), mengemukakan bahwa menurut Stible dan Stroomberg, bukti autentik mengenai catatan pembukuan di Indonesia paling tidak sudah ada menjelang pertengahan abad ke-17. Jadi pada zaman kolonial pencatatan pertama kali di Indonesia dilakukan oleh Belanda kemudian diikuti oleh orang Indonesia.

#### **b. Zaman Penjajahan Belanda**

Setelah VOC bubar pada 31 Desember 1799, kekuasaan diambil alih oleh Kerajaan Belanda, zaman penjajahan Belanda dimulai tahun 1800-1942. Pada waktu itu, catatan pembukuannya menekankan pada mekanisme debit dan kredit, yang antara lain dijumpai pada pembukuan Amphioen Socyteit di Batavia yang bergerak dalam usaha peredaran candu atau morfin (amphioen) yang merupakan usaha monopoli di Belanda. Banyak perusahaan Belanda yang didirikan di Indonesia pada abad ke-19. Catatan pembukuannya merupakan modifikasi sistem Venesia-Italia, dan tidak dijumpai adanya kerangka pemikiran konseptual untuk mengembangkan sistem pencatatan karena kondisinya sangat menekankan pada praktik-praktik dagang yang semata-mata untuk kepentingan perusahaan Belanda.

**c. Zaman Penjajahan Jepang**

Pada masa penjajahan Jepang 1942-1945, banyak orang Belanda yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel-sel oleh tentara Jepang, sehingga menyebabkan menteri keuangan kekurangan tenaga kerja. Untuk mengatasi hal tersebut, diadakan latihan pegawai dan kursus-kursus pembukuan pola Belanda dengan tenaga pengajarnya, antara lain J.E de F'duse, Akuntan, Dr. Abutari, Akuntan, J.D. Masie dan R.S. Koesoemoputro. Sejalan dengan itu, kondisi pembukuan pada masa pendudukan Jepang tidak mengalami perubahan. Jepang juga mengajarkan pembukuan dengan menggunakan huruf Kanji, namun tidak diajarkan pada orang-orang Indonesia.

**d. Zaman Kemerdekaan**

Sistem akuntansi yang berlaku di Indonesia setelah zaman penjajahan adalah sistem akuntansi Belanda yang lebih dikenal dengan sistem tata buku. Pada zaman setelah kemerdekaan banyak modal asing yang masuk ke Indonesia dalam rangka mempercepat proses pemulihan pembangunan. Masuknya modal asing di Indonesia serentak dengan masuknya bantuan luar negeri, khususnya dari Amerika dan sekutunya sehingga pemerintah Amerika juga memberikan bantuan berupa sistem akuntansi di pemerintahan, dosen-dosen tamu yang mengajar di berbagai Universitas di Indonesia. Masuknya modal asing di Indonesia menyebabkan muncul sistem akuntansi baru, yaitu model-model sistem akuntansi Amerika yang dipelajari di universitas-universitas se-Indonesia.



Pada saat yang sama, perusahaan yang ada masih tetap mengikuti sistem akuntansi Belanda yang sudah mapan. Sejak saat ini, muncullah dualisme sistem akuntansi di Indonesia. Pada tahun 1980 atas bantuan pinjaman dari Bank Dunia (*World Bank*), pemerintah Indonesia melakukan upaya harmonisasi sistem akuntansi sehingga diupayakan untuk menghapuskan sistem dualisme antara sistem akuntansi Belanda dan sistem akuntansi Amerika sehingga berakhirlah dualisme sistem akuntansi di Indonesia. Upaya yang dilakukan antara lain mendirikan Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) di Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran dan Universitas Sumatera Utara.

## **2. Sejarah Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia**

Standar Akuntansi Keuangan yang berkualitas merupakan salah satu prasarana penting sebagai pedoman pokok untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan bagi perusahaan dan unit ekonomi lainnya. Jadi dengan adanya standar akuntansi yang baik, maka laporan keuangan dapat menjadi lebih berguna dan dapat menciptakan transparansi bagi perusahaan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sebagai wadah profesi akuntansi di Indonesia, senantiasa berusaha untuk tanggap terhadap perkembangan yang terjadi, baik dalam lingkup nasional, regional, maupun global, khususnya dalam hal-hal yang mempengaruhi dunia

usaha dan profesi akuntansi. Hal ini dapat dilihat dari dinamika kegiatan pengembangan standar akuntansi sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini. Setidaknya, terdapat tiga tonggak sejarah yang pernah dicapai sebelumnya dalam pengembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. Pada masa itu merupakan pertama kalinya IAI berhasil melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku "Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)." pada tahun 1973, dengan maksud antara lain:
  - a. Menghimpun prinsip-prinsip yang lazim berlaku di Indonesia
  - b. Sebagai prasarana pasar uang dan modal pada saat itu.
  - c. Laporan Keuangan perusahaan yang go publik harus disusun berdasar Prinsip Akuntansi Indonesia.

Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk menghimpun Prinsip Akuntansi Indonesia 1973 antara lain:

- a. Buku *Prinsip-prinsip Accounting* yang diterbitkan oleh Direktorat Akuntan Negara, Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN), Departemen Keuangan RI sekarang bernama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- b. *Inventory of Generally Accepted Accounting Principles for Business Enterprise*, oleh Paul Grady, diterbitkan oleh AICPA.

- c. *Opinions of Australian Accounting Principles*, diterbitkan oleh Accounting and Auditing Research Committee dari Accounting Research Foundation.
  - d. Kumpulan dari *Accounting Research Bulletins* diterbitkan AICPA.
  - e. *A Statement of Australian Accounting Principles*, diterbitkan oleh NIVRA.
  - f. *Wet op de Jaarekening van Ondernemingen*, diterbitkan oleh NIVRA.
2. Tahun 1984. Pada masa itu, komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 dan kemudian mengkondifikasikannya dalam buku "Prinsip Akuntansi Indonesia 1984" dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia usaha. Hanya saja dalam PAI 1984 dibatasi pada hal-hal yang berhubungan dengan akuntansi keuangan yang diungkapkan secara garis besar atau bersifat umum tidak mencakup praktik akuntansi untuk industri tertentu. Pada Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 masih memerlukan penjabaran lebih lanjut diatur dengan "pernyataan" tersendiri. Sehubungan dengan itu, Komite PAI-IAI mulai tahun 1986 menerbitkan serangkaian pernyataan PAI dan interpretasi PAI untuk mengembangkan, menambah, mengubah serta menjelaskan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PAI 1984.

3. Tahun 1994, setelah berlangsung selama 10 tahun IAI kembali melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan melakukan kodifikasi dalam buku "Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Oktober 1994." IAI mengadopsi pernyataan *International Accounting Standard Committee* (IASC) sebagai dasar acuan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, kemudian menerbitkan dua buah buku yaitu Standar Akuntansi Keuangan–Oktober 1994, Buku 1 dan Buku 2 yang berisi:
  - (1). Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
  - (2). Seperangkat Standar Akuntansi Keuangan, terdiri dari 35 Pernyataan yang setaraf dengan standar internasional.

Kerangka dasar dan seperangkat pernyataan tersebut merupakan landasan yang dianggap kokoh untuk pengembangan lebih lanjut. Berlaku untuk penyusunan Laporan Keuangan mencakup periode laporan yang dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 1995. Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan IAI disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Sejak diterbitkannya buku Standar Akuntansi Keuangan tahun 1994, IAI terus melakukan revisi guna penyempurnaan standar yang sudah ada maupun penambahan standar baru dan interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

IAI juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan Standar Akuntansi Internasional dalam pengembangan standarnya. Dalam perkembangannya, Standar Akuntansi Keuangan

terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994. Proses revisi telah dilakukan delapan kali, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, 1 September 2007, 1 juli 2009 dan 1 januari 2012.

### **3. Sejarah Perkembangan Penyusun Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia**

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) didirikan di Jakarta tanggal 23 Desember 1957. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah profesi akuntan di Indonesia selalu tanggap terhadap perkembangan yang terjadi, khususnya dalam hal-hal yang mempengaruhi dunia usaha dan profesi akuntansi dunia usaha dan profesi akuntan. Pengembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1973 dengan dibentuknya Panitia Penghimpunan Bahan-bahan dan Struktur daripada GAAP dan GAAS. Selanjutnya pada tahun 1974 dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan. Kemudian komite PAI tersebut pada tahun 1994 diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan (KSAK). Pada kongres VIII 23-24 September 1998 di Jakarta. Komite SAK diubah kembali namanya menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) untuk masa bakti 1998–2002 dan diberi otonomi khusus untuk menyusun dan mengesahkan PSAK dan ISAK. Selain itu, juga telah dibentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) dan Dewan

Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan (DKSAK). Komite Akuntansi Syariah (KAS) dibentuk pada tanggal 18 Oktober 2005 untuk menopang kelancaran kegiatan penyusunan PSAK yang terkait dengan perlakuan akuntansi transaksi syariah yang dilakukan oleh DSAK. Sedangkan DKSAK yang anggotanya terdiri atas profesi akuntan dan luar profesi akuntan, yang mewakili para pengguna, merupakan mitra DSAK dalam merumuskan arah dan pengembangan SAK di Indonesia.

Badan yang membuat Standar Akuntansi Keuangan di Amerika Serikat yaitu *Financial Accounting Standards Board* (FASB) yang berdiri tahun 1973 menggantikan *American Principles Board* (APB) sebuah lembaga swasta yang bertanggung jawab untuk pembentukan standar akuntansi keuangan di Amerika Serikat. Pada tahun 2007 Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia mengesahkan tiga *Exposure Draft* menjadi PSAK yaitu PSAK No. 13 (Revisi 2007) Properti Investasi, PSAK No. 16 (Revisi 2007) Aset Tetap dan PSAK No. 30 (Revisi 2007) Sewa. Ketiga PSAK tersebut berlaku efektif untuk penyusunan laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2008. Pengesahan ketiga PSAK tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses konvergensi PSAK terhadap *International Financial Reporting Standard* (IFRS). Oleh karena itu, materi PSAK baru tersebut diambil seluruhnya dari IFRS dengan beberapa penyesuaian karena adanya beberapa nomor IFRS yang belum diadopsi di dalam PSAK.

#### **4. Tiga Pilar Standar Akuntansi Indonesia**

##### **a. Standar Akuntansi Keuangan**

Standar Akuntansi Keuangan adalah SAK yang telah berlaku sekarang. Dengan SAK yang telah terkonvergensi ke IFRS diharapkan akan memberikan persepektif pemahaman yang sama bagi investor asing dalam membaca laporan keuangan perusahaan Indonesia ataupun investor Indonesia yang ingin ekspansi ke luar negeri.

##### **b. Standar Akuntansi Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP)**

Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 17 Juli 2009 yang lalu, telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) atau *The Indonesian Accounting Standards for Non-Publicly-Accountable Entities*, dan telah disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 19 Mei 2009. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) sendiri beranggotakan 17 orang mewakili: Akuntan publik, Akademisi, Akuntan Sektor Publik, dan Akuntan Manajemen. Alasan IAI menerbitkan standar ini adalah untuk mempermudah perusahaan kecil dan menengah (UKM) dalam menyusun laporan keuangan mereka. Dimana jika standar ini tidak diterbitkan, perusahaan UKM juga harus mengikuti SAK baru yang sudah mengadopsi IFRS untuk menyusun laporan keuangan mereka. SAK berbasis IFRS ini relatif lebih kompleks dan sangat mahal bagi perusahaan kecil dan menengah untuk menerapkannya.

Apabila SAK-ETAP ini telah berlaku efektif, maka perusahaan kecil seperti UKM tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan PSAK umum yang berlaku. Di dalam beberapa hal SAK-ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Sesuai dengan ruang lingkup SAK-ETAP maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik (entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal).

SAK-ETAP ini berlaku efektif 1 Januari 2011 namun penerapan dini per 1 Januari 2010 diperbolehkan. Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK-ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK-ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK-ETAP. Apabila perusahaan memakai SAK-ETAP, maka auditor yang akan melakukan audit diperusahaan tersebut juga akan mengacu pada SAK-ETAP.

Dua kriteria yang menentukan apakah suatu entitas tergolong entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yaitu:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan

Suatu entitas dikatakan memiliki akuntabilitas yang signifikan jika:



- a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAM-LK) atau regulator lain untuk penerbitan efek di pasar modal.
- b. Entitas menguasai asset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti : bank, entitas asuransi, pialang, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.
2. Tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal.

**c. Standar Akuntansi Syariah**

Komite Akuntansi Syariah bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan–Ikatan Akuntan Indonesia telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan untuk transaksi kegiatan usaha dengan mempergunakan akuntansi berdasarkan kaidah syariah. Standar Akuntansi Syariah akan diluncurkan dalam tiga bahasa yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Standar ini diharapkan dapat mendukung industri keuangan syariah yang semakin berkembang di Indonesia.

IAI sebagai lembaga yang berwenang dalam menetapkan Standar Akuntansi Keuangan dan audit bagi berbagai industri merupakan elemen penting dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia, dimana perekonomian syariah tidak dapat berjalan dan berkembang dengan baik tanpa adanya Standar Akuntansi Keuangan yang baik. Standar akuntansi dan audit yang sesuai dengan prinsip syariah sangat dibutuhkan dalam rangka mengakomodir perbedaan

esensi antara operasional Syariah dengan praktek perbankan yang telah ada (konvensional). Untuk itulah maka pada tanggal 25 Juni 2003 telah ditandatangani nota kesepahaman antara Bank Indonesia dengan IAI dalam rangka kerjasama penyusunan berbagai standar akuntansi di bidang perbankan Syariah, termasuk pelaksanaan kerjasama riset dan pelatihan pada bidang-bidang yang sesuai dengan kompetensi IAI.

Badan yang menerbitkan Standar Akuntansi Islam pada saat ini adalah *the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAO-IFI) yang didirikan sejak 1991 di Bahrain. Sampai dengan saat ini telah diterbitkan 56 Standar Akuntansi Islam dalam bidang akuntansi, auditing, *governance* dan etika. Anggota *Technical Board* AAOIFI berjumlah 20 orang, dengan 115 anggota yang mewakili 27 negara. Saat ini juga sedang disusun program *Certified Islamic Public Accountant (CIPA)* yang akan segera disebarluaskan ke beberapa negara (Alchaar, 2006).

Landasan konseptual untuk akuntansi transaksi syariah telah disusun oleh DSAK dalam bentuk Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Hal ini diperlukan karena transaksi syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan transaksi usaha umumnya sehingga ada beberapa prinsip akuntansi umum yang tidak dapat diterapkan dan diperlukan suatu penambahan prinsip akuntansi yang dapat dijadikan landasan konseptual.

Tabel 4.1  
Perbandingan SAK

SAK IFRS	SAK ETAP	SAK Syariah
Digunakan oleh perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia	Digunakan oleh perusahaan UKM	Digunakan oleh perusahaan berbasis syariah

## 5. Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Menuju Standar Akuntansi Internasional

### a. Perbandingan Rerangka Konseptual FASB dan Rerangka Konseptual IASC

#### Rerangka Konseptual FASB

Dewan penyusun standar akuntansi di Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1936 dengan nama *Committee on Accounting Procedure* (CAP). Dewan ini bekerja sampai tahun 1959 dan berganti nama menjadi *Accounting Principles Board* (APB). Hasil karya APB yang terkenal adalah ARS nomor 7 dan yang paling terkenal adalah APB Statemen No. 4 yang diterbitkan tahun 1970. APB bekerja sampai dengan tahun 1973, kemudian digantikan oleh *Financial Accounting Standards Board* (FASB) sampai sekarang ini. FASB berbeda dengan dewan-dewan sebelumnya, karena didukung oleh enam organisasi profesi, yaitu, AAA, AICPA, *Financial Analysts Federation*, *Financial Executive Institute*, *Institute of Management Accountants*, dan *Securities Industry Association*. Setelah mengalami beberapa titik waktu (*Juncture*) dalam merumuskan prinsip-prinsip akuntansi (Zeff 1984), FASB akhirnya berhasil

membuat sebuah model rerangka konseptual yang mapan disebut, *Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC)*. Model rerangka konseptual FASB ini mencakup empat komponen dasar, yaitu:

1. Tujuan pelaporan keuangan
2. Kriteria kualitas informasi
3. Elemen-elemen laporan keuangan
4. Pengukuran dan Pengakuan

Rerangka ini merupakan dasar teoritis bagi FASB dalam mengembangkan Standard Akuntansi Keuangan (*Statement of Financial Accounting Standard*) di Amerika Serikat. Standar-standar tersebut berkenaan dengan pengukuran aktivitas ekonomi, penentuan waktu kapan pengukuran dan pencatatan harus dilakukan, ketentuan pengungkapan mengenai aktivitas tersebut, penyiapan dan penyajian ringkasan aktivitas ekonomi tersebut dalam bentuk laporan keuangan.

#### **Rerangka Konseptual IASC**

Pembentukan IASC terjadi pada tanggal 23 Juni 1973 di Inggris yang diwakili oleh organisasi profesi akuntansi dari sembilan negara, yaitu Australia, Canada, Prancis, Jerman Barat, Jepang, Mexico, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat (Nobes dan Parker 1995: 9; dan Solomons, 1986: 60). Tujuan pembentukan IASC adalah, “*to formulate and publish in the public interests, basic standards to be observed in the presentation of audited accounts and financial statements and to promote their worldwide acceptance and*

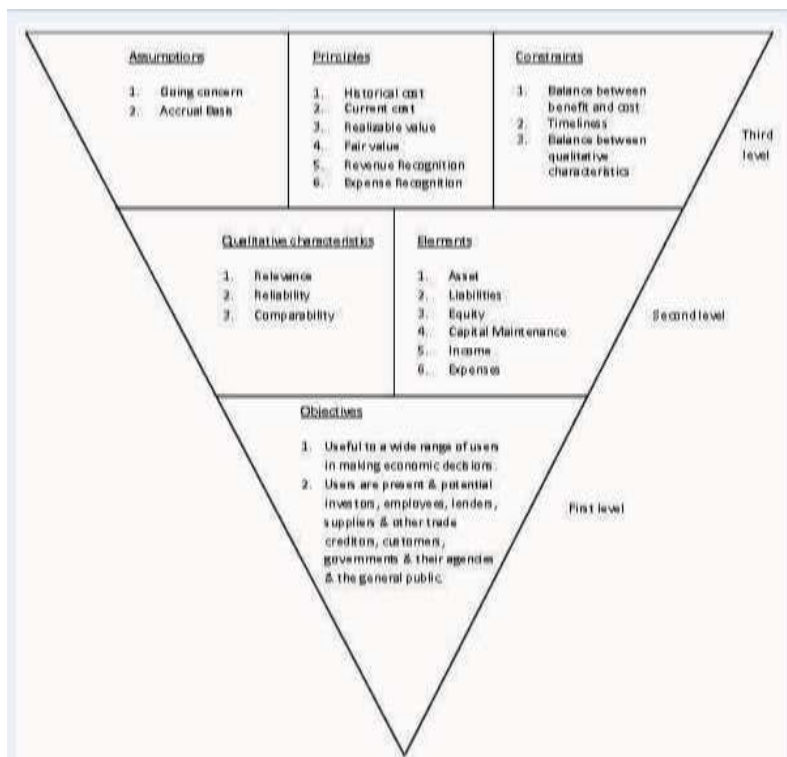
*observance*” Jadi tujuan dibentuknya IASC adalah memformulasi standar dan mendorong keberterimaan dan ditaatinya IFRS secara luas di dunia. (Solomons 1986: 60). Sampai saat ini IASC beranggotakan sekitar 150 organisasi atau badan penyusun standard akuntansi dari 113 negara (media akuntansi, 2000), dan telah berhasil merumuskan model teoritis yang juga mengadopsi meta teori dengan menempatkan tujuan sebagai *top level*. Model ini disebut *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements* (FPPFS) (naskah asli terdapat di IAI, SAK, Oktober 2004). Kerangka dasar ini pada hakikatnya memuat lima unsur utama, yaitu:

1. Tujuan laporan keuangan.
2. Asumsi dasar dan konsep modal dan pemeliharaan modal.
3. Karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan.
4. Elemen-elemen laporan keuangan.
5. Definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan.

Kerangka dasar ini dimaksudkan sebagai acuan bagi komite penyusun Standar Akuntansi Keuangan dalam pengembangan Standar Akuntansi Keuangan dimasa depan dan dalam peninjauan kembali terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

### b. Perbandingan Rerangka Konseptual US GAAP dan IFRS

Perbandingan US GAAP dan IFRS dibagi menjadi 3 level, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.1



Gambar 5.1  
Rerangka Konseptual IFRS

#### Level 1 Tujuan Laporan Keuangan:

US GAAP	IFRS
a. Menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit.	a. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi

b. Menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan perusahaan.	keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.
c. Menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi, klaim terhadap sumber daya tersebut, dan perubahan terhadap keduanya.	b. Pengguna adalah investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah dan masyarakat.

## Level 2

### Karakteristik Kualitatif Informasi Akuntansi

US GAAP	IFRS
<p>Relevan, terdiri dari:</p> <p>a. Nilai prediksi, membantu pengguna memprediksi hasil dari kejadian masa lalu, saat ini dan masa depan.</p> <p>b. Nilai umpan balik, membantu pengguna mengkonfirmasi dan</p> <p>c. membetulkan nilai prediksi sebelumnya.</p> <p>d. Tepat waktu, tersedia sebelum kehilangan kapasitas untuk</p>	<p>Relevan, terdiri dari:</p> <p>a. Nilai prediksi.</p> <p>b. Nilai konfirmasi.</p> <p>c. Materialitas.</p> <p>d. Dapat dipercaya karena disajikan dengan jujur, netral, substansi mengungguli bentuk, dikerjakan secara hati-hati, lengkap serta dapat dibandingkan.</p>

mempengaruhi keputusan. e. Dapat dipercaya karena disajikan dengan jujur, netral dan dapat diverifikasi serta dapat dibandingkan dan konsisten.	
--	--

### Elemen Laporan Keuangan

US GAAP	IFRS
a. Aset. b. Kewajiban. c. Ekuitas. d. Investasi pemilik. e. Distribusi kepada pemilik. f. Laba komprehensif. g. Pendapatan. h. Keuntungan. i. Beban. e. Kerugian.	a. Aset. b. Kewajiban. c. Ekuitas. d. Pemeliharaan modal (diperoleh dari revaluasi asset dan kewajiban). e. Laba (Pendapatan dan keuntungan) . f. Beban (beban dan kerugian).

### Level 3

#### Pengakuan dan pengukuran – Asumsi dasar

US GAAP	IFRS
1. Kelangsungan usaha. 2. Entitas ekonomi.	1. Kelangsungan usaha. 2. Basis akrual.



3. Unit moneter.	
4. Periodisitas.	

### **Pengakuan dan Pengukuran – Prinsip**

US GAAP	IFRS
1. Biaya historis. 2. Pengakuan pendapatan. 3. Kesesuaian. 4. Pengungkapan penuh.	1. Biaya historis. 2. Biaya sekarang (apa yang harus dibayar hari ini untuk mendapatkan aset). 3. Nilai realisasi (jumlah kas yang dapat diperoleh saat ini jika aset dilepas). 4. Nilai wajar. 5. Pengakuan pendapatan. 6. Pengakuan beban. 7. Pengungkapan penuh.

### **Pengakuan dan Pengukuran – Kendala**

US GAAP	IFRS
1. Biaya dan manfaat. 2. Materialitas. 3. Praktik Industri. 4. Konservatisme.	1. Keseimbangan antara biaya dan manfaat. 2. Tepat waktu. 3. Keseimbangan antara karakteristik kualitatif.

### c. Tujuan Mengganti Standar Akuntansi Keuangan

Harmonisasi merupakan proses untuk meningkatkan kompatibilitas (kesesuaian) praktik akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat beragam (Choi, et al. 1999). Harmonisasi juga bisa diartikan sebagai sekelompok negara yang menyepakati suatu standar akuntansi yang mirip, namun mengharuskan adanya pelaksanaan yang tidak mengikuti standar harus diungkapkan dan direkonsiliasi dengan standar yang disepakati bersama. Beberapa pihak yang diuntungkan adalah perusahaan multinasional, kantor akuntan internasional, organisasi perdagangan, serta IOSCO (*International Organization of Securities Commissions*).

Tabel 5.1  
Perbedaan antara Adaptasi, Kovergensi, dan Full adopsi

<b>Perbedaan</b>	Adaptasi	Konvergensi	Full Adopsi
Arti harafiah	Penyelarasan	Pertemuan pada suatu titik	pemakaian
Standart akuntansi	Membuat standar yang benar-benar baru	Membuat standar baru dengan mempertimbangkan keadaan yang berlaku	Mentranslet standar lama menjadi standar baru
Contoh Negara	Indonesia sebelum IFRS	Indonesia setelah 2012	Australia, Hongkong

Mengutip pernyataan Prof. Indra dalam orasi ilmiah pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, beliau mengatakan: “Indonesia mengadopsi secara penuh seperti Australia sangat tidak mungkin, adopsi yang mungkin adalah

Mengadopsi IFRS berkarakteristik Indonesia yang lebih bersifat *taylor-made* namun memenuhi kebutuhan internasional serta dapat melepaskan diri dari tekanan dunia internasional”. Pernyataan itulah yang lebih tepat menjelaskan istilah konvergensi bagi Indonesia.

*International Financial Reporting Standards* (IFRS) dijadikan sebagai referensi utama pengembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia karena IFRS merupakan standar yang sangat kokoh. Standar Akuntansi Internasional disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasioanal (IFAC). Sebelumnya IFRS ini lebih dikenal dengan nama *International Accounting Standards* (IAS) yang diterbitkan antara tahun 1973 dan 2001 oleh *Board of the International Accounting Standards Committee* (IASC). Mengadopsi IFRS berarti mengadopsi bahasa pelaporan keuangan global yang akan membuat suatu perusahaan dapat dimengerti oleh pasar global. Beralih ke IFRS bukan hanya sekedar pekerjaan mengganti angka-angka di laporan keuangan, tetapi mengubah pola pikir dan cara semua elemen di dalam perusahaan. Penerapan standar akuntansi yang sama di seluruh dunia akan mengurangi masalah-masalah terkait daya banding (*comparability*) dalam pelaporan keuangan. Yang paling diuntungkan sudah jelas, investor dan kreditor trans-nasional serta badan-badan internasional. Tidak mengherankan, banyak perusahaan

yang telah mengadopsi IFRS mengalami kemajuan yang signifikan saat memasuki pasar modal global.

Dalam perkembangan penyusunan standar akuntansi dikenal dengan dua pendekatan (Hoesada, 2008) yaitu:

*Principle – Based Accounting Standards:*

1. Mengatur prinsip-prinsip akuntansi untuk suatu jenis transaksi, khususnya terkait dengan pengakuan dan pengukuran, dan tidak mengatur untuk suatu jenis industri tertentu.
2. Kelebihannya : *principle based system* tidak atau sedikit memberi peluang untuk melakukan kreativitas negatif atas peraturan akuntansi. Dua transaksi yang secara substansi sama akan diperlakukan dan dicatat sama oleh dua perusahaan yang berbeda. Serta pengaturan akuntansi yang ada berlaku untuk seluruh perusahaan.
3. Memerlukan banyak *professional judgement* yang menuntut kompetensi dan integritas yang tinggi, kesiapan profesi pendukung dengan semakin dominannya *fair value accounting*.
4. Digunakan oleh *international Accounting Standards Board* (IASB)

*Ruled – Based Accounting Standards:*

1. Mengatur secara lebih detail dan biasanya hanya berlaku untuk suatu industri tertentu.
2. Kelebihannya: lebih mudah diterapkan karena peraturannya lebih eksplisit.

3. Tidak banyak memerlukan *professional judgement*. Namun, membuka peluang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan sempit.

4. Digunakan oleh *Financial Accounting Standards Board* (FASB)

FASB merefleksikan tingkat kecanggihan dan adidaya ekonomi dan keuangan Amerika Serikat, sebaliknya IAS berupaya merangkul seluas-luasnya semua negara-negara di dunia dari yang paling kaya-canggih sampai pada negara yang paling terbelakang-miskin (Hoesada, 2008). Konvergensi IFRS terhadap PSAK akan menyebabkan PSAK yang tadinya bersifat *Ruled – Based* menjadi bersifat *Principle – Based*. Selain itu, konvergensi IFRS terhadap PSAK juga menuntut akuntan harus memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi dalam menyusun laporan keuangan, sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan oleh pembuat keputusan dalam mengambil keputusan yang tepat.

*Compliance* terhadap IFRS memberikan manfaat terhadap keterbandingan laporan keuangan dan peningkatan transparansi. *Compliance* terhadap IFRS menyebabkan laporan keuangan perusahaan Indonesia akan dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan perusahaan dari negara lain, sehingga akan sangat jelas kinerja perusahaan mana yang lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas Standar Akuntansi Keuangan. Selain itu, program konvergensi juga bermanfaat untuk mengurangi biaya modal (*cost of capital*) dengan membuka peluang *fund raising* melalui pasar modal secara global, meningkatkan investasi global, dan mengurangi beban

penyusunan laporan keuangan, meningkatkan kredibilitas dan kegunaan Laporan Keuangan, meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan, dan menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan. Disisi lain tujuan konvergensi IFRS adalah agar laporan keuangan berdasarkan PSAK tidak memerlukan rekonsiliasi signifikan dengan laporan keuangan berdasarkan IFRS dan kalaupun ada diupayakan hanya relatif sedikit sehingga pada akhirnya laporan auditor menyebut kesesuaian dengan IFRS.

Pembuatan standar akuntansi di IASC oleh beberapa negara yang disebut dengan nama G4+1 yang terdiri dari perwakilan badan-badan standar nasional dari negara Australia, Kanada, Selandia Baru, Inggris dan Amerika Serikat. Keberagaman wakil yang duduk dalam IASC ini juga mencerminkan keberagaman tingkatan ekonomi negara-negara yang diwakilinya, hal ini terkadang memerlukan kompromi-kompromi guna menyetujui sebuah standar. Anggota yang tergabung dalam G4+1 berkumpul secara intensif dan bekerja penuh waktu. Dalam setiap proyek pengembangan yang dikerjakan, mereka mengembangkannya kedalam lingkup negara mereka masing-masing. Kebutuhan informasi para investor tampaknya lebih terkait dengan Amerika Serikat, Eropa Daratan, Inggris, dan Australia. Jika standar akuntansi internasional dimaksudkan berlaku untuk semua anggota IASC, yang memiliki banyak perbedaan, maka hal ini merupakan hambatan yang barangkali sulit dipecahkan. Radebaugh (1975:41) mengemukakan bahwa banyak sekali faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pengembangan tujuan,

standar, dan praktik akuntansi. Karakteristik dan tingkatan yang berbeda antar negara merupakan hambatan mendasar yang dihadapi dalam proses harmonisasi Standar Akuntansi Keuangan. Hambatan lain yang muncul adalah adanya perbedaan kebutuhan dan keinginan antara negara maju dengan yang belum maju dan antara negara yang tingkat pertumbuhannya sangat tinggi dan negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi lebih rendah bahkan sangat rendah. Apa yang tepat diterapkan di Amerika Serikat, belum tentu cocok diterapkan di negara lain dengan karakteristik lingkungan dan perkembangan ekonomi yang berbeda. Demikian pula apa yang dirancang oleh G4+1 belum tentu cocok diterapkan untuk seluruh anggota IASC. Yang harus dilakukan oleh IASC sebagai badan penyusun Standar Akuntansi Internasional adalah membuat para anggota merasa butuh menerapkan IFRS. Upaya yang bisa ditempuh:

1. Mengajukan pengakuan melalui *International Organization of Securities Commissions*, supaya perusahaan (Negara) yang akan melakukan *crossborder listing* menggunakan IFRS dalam pelaporan keuangan mereka. Tindakan ini selanjutnya diikuti dengan Pengakuan oleh komisi-komisi efek atau peraturan yang ada. Jika hal ini terjadi, maka akan mendorong perusahaan-perusahaan multinasional untuk *listing* di bursa efek mancanegara.
2. IASC harus membentuk badan penyusun standar yang terpisah dari badan-badan akuntansi. Untuk itu, IASC harus melakukan restrukturisasi. Saat ini IASC didominasi oleh badan-badan

profesi akuntansi sebagai penyusun standar. Restrukturisasi ini diharapkan dapat mendorong kemandirian baik dari segi dana maupun operasional.

Dampak dari harmonisasi Standar Akuntansi Keuangan salah satunya adalah globalisasi profesi akuntansi. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, profesi akuntan dituntut untuk lebih berkembang yang mendorong profesi akuntan untuk semakin mengembangkan wawasan, keterampilan, pendidikan, dan etika menjadi tanggung jawab penuh dari profesi akuntan.

Masalah muncul setiap ada standar baru yang diterbitkan untuk menyempurnakan keberadaan standar tersebut. Peran akuntansi akan semakin sentral sebagai pengelolah informasi. Bahkan banyak yang belum memahami transformasi di pasar keuangan. Profesi ini tampaknya semakin bergerak sehingga setiap data semakin berarti di dalam pengambilan keputusan.

Di Indonesia program harmonisasi Standar Akuntansi Keuangan yang dilakukan IAI juga berdampak pada pendidikan akuntansi di perguruan tinggi. Mahasiswa lulusan S1 akuntansi dituntut agar siap terjun ke dunia profesi akuntan setelah lulus perguruan tinggi. Dampak yang lain adalah munculnya matakuliah yang mengandung internasional. Dengan adanya harmonisasi Standar Akuntansi Keuangan maka profesi akuntansi lulusan Indonesia berkesempatan untuk bekerja di mana saja di dunia, karena program pendidikan akuntansi yang mereka tempuh adalah program yang sesuai dengan standar internasional (HadiBroto, 2007).



## SIMPULAN

Standar akuntansi tidak dapat lepas dari pengaruh lingkungan dan kondisi hukum, sosial dan ekonomi suatu negara. Dan adanya era globalisasi dan semakin aktifnya pasar modal di Indonesia menyebabkan Prinsip Akuntansi Indonesia yang berlaku umum tidak dapat lagi menampung dan menjawab permasalahan yang timbul dalam praktik. Ikatan Akuntan Indonesia memutuskan untuk mengadopsi penuh *International Accounting Standards* sebagai dasar acuan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Globalisasi yang tampak antara lain dari kegiatan perdagangan antar negara dan munculnya perusahaan-perusahaan multinasional. Salah satu usaha harmonisasi standar akuntansi, yaitu dengan membuat perbedaan-perbedaan antar standar akuntansi di berbagai negara menjadi semakin kecil, sehingga standar akuntansi antar negara tidak memiliki perbedaan yang signifikan.

Standar Akuntansi Keuangan yang lengkap dan komprehensif merupakan dambaan semua pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Oleh karena itu, standar akuntansi keuangan ini dari waktu ke waktu akan terus dilengkapi dan disempurnakan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan praktik bisnis dan profesi akuntansi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alchaar, Mohammad N. 2006. Newsletter AAO-IFI. AAO-IFI *website*.
- Ans Sarbanon Sapiie. [www.samuelsinaga.blogspot.com](http://www.samuelsinaga.blogspot.com)
- Arja, S., 1999, Akuntansi Internasional : Harmonisasi Versus Standardisasi, *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 1, No. 2, November: 144 – 161.
- Choi, Frederick D.S., Carol Ann Frost, Garry K Meek. 1999. *International Accounting*. 3th edition. United States: Prentice Hall International.
- Diga, J. and Yunus H. (1997), 'Accounting in Indonesia', in Nabil Baydoun and Akira Nishimura and Roger Willet (eds) *Accounting in the Asia Pacific Region*, John Wiley & Sons, p 282-302.
- Hadibroto, A. "Peran IAI K.APd dan Perguruan Tinggi di Indonesia dalam menghadapi Tantangan Globalisasi" Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Standa kualitas Pendidikan Tinggi akuntansi 12-13 April 2007
- Hendriksen, Eldon S. (1995). *Teori Akuntansi*. Edisi Keempat. Jilid Satu Jakarta: Erlangga.
- Hoesada, Jan. 2008. Overview for Accounting Framework of IFRS. Seminar dan Lokakarya IFRS for Today. Bandung: Universitas Kristen Maranatha.

- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2008. Prinsip Akuntansi : sejarah SAK. [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. Program konvergensi IFRS 2009. [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id). 3 april 2009
- Kwik, Kian Gie, 1994. Analisis ekonomi politik Indonesia. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Lilik P., 2007, Dampak Harmonisasi Standar Akuntansi Keuangan terhadap Peran Akuntansi, Perkembangan Profesi Akuntan dan Pendidikan Akuntansi, *Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 5, No. 3, Desember: 372-378.
- Media akuntansi, Edisi 7/tahun I/Maret 2000.
- Narsa, 2007, Struktur Meta Teori Akuntansi Keuangan (Sebuah Telaah dan Perbandingan antara FASB dan IASC), *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 9, No. 2, November: 43-51.
- Nobes, Christopher dan Parker, Robert. 1995, *Comparative International Accounting* , 4th.Hemel Hempstead: Prentice-Hall Internatio-nal (UK)
- Nunik L.D., 2010, Perbedaan IFRS, US GAAP, dan PSAK: *Investement Property*, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2, No.1, Mei: 59-69
- Radebaugh, Lee H. Fall 1975 “*Environmental Factors influencing the Development of Accounting Objectives, Standards, and Practices inPeru*”, *The International Journal of Accounting Education and Research*.

- Rindu R.G., 2009, Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Menuju *International Financial Reporting Standards*, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 14, No. 2, Juli: 153-166.
- Rosser, J. Barkley, Jr. 1999. "On the complexities of complex economic dynamics." *Journal of Economic Perspectives* 12(4), 169-192.
- Solomons, David. 1986 "Making Accounting Policy: The Quest for Credibility in Financial Reporting". New York: Oxford University Press
- S.R. Soemarso., 1995. Akuntansi suatu pengantar Jilid I. PT Rineka Cipta Mandiri. Jakarta
- Zeff, Stephen A. 1984, "Some Junctures in the evolution of the process Establishing Accounting Principles in the U.S.A.: 1917-1972," *Accounting Review*, Vol. 59, No. 3: 447-468